



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pengantar

DISKUSI AKHIR TAHUN TELEMATIKA INDONESIA

oleh:

Eddy Satriya

(eddysatriya.blogspot.com)

Asisten Deputi Telematika dan Utilitas

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Graha Sawala, Departemen Keuangan
Jakarta, 27 Desember 2007

TUJUAN

- 1. Menyediakan ajang diskusi (2 arah) dengan periode yang memadai untuk menampung masukan masyarakat dan dunia bisnis secara langsung;**
- 2. Membahas berbagai permasalahan telematika dan pengelolaannya, terutama hal-hal yang berpotensi menjadi kendala pembangunan;**
- 3. Mencari masukan guna meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan telematika bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang semakin beragam;**



DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Permasalahan Telematika
Kita
3. Penutup

A decorative graphic in the top-left corner of the slide features three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon is attached to a string and has several small yellow triangular shapes radiating from it, resembling streamers or confetti. The balloons are positioned to the left of a central red banner.

PENDAHULUAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PASAL 2

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian

PASAL 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian;
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- Pengendalian penyenggaraan kebijakan, sebagai mana di makdud pada huruf a dan huruf b;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden; dan
- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

PASAL 4

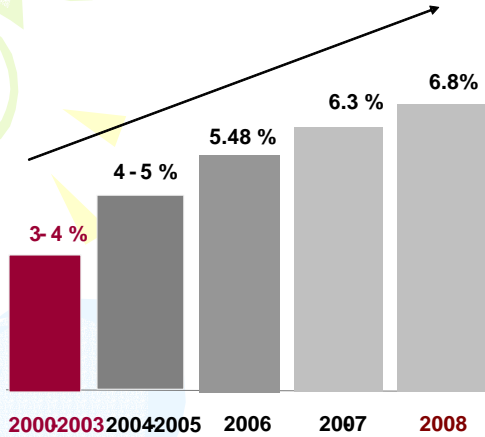
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

- a. Departemen Keuangan;
- b. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Departemen Perindustrian;
- d. Departemen Perdagangan;
- e. Departemen Pertanian;
- f. Departemen Kehutanan;
- g. Departemen Perhubungan;
- h. Departemen Kelautan dan Perikanan;
- i. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Departemen Pekerjaan Umum;
- k. Departemen Komunikasi dan Informatika;
- l. Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- m. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal;
- o. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- p. Instansi lain yang dianggap perlu.

INDONESIA : KONDISI MAKROEKONOMI

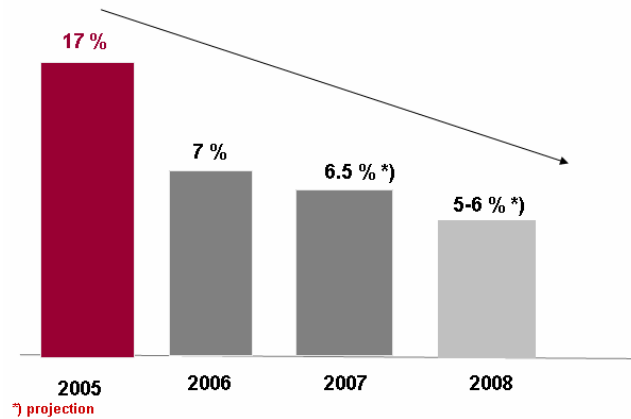
Economic Growth

% Change in PDB



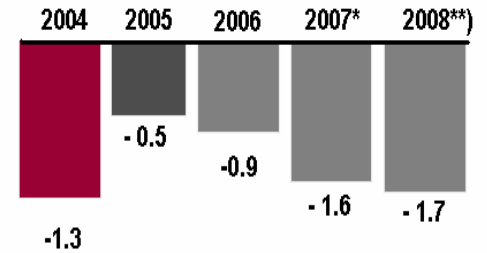
Inflation Rate

Inflation Rate (%)



Budget Deficit

Budget Deficit (% of GDP)

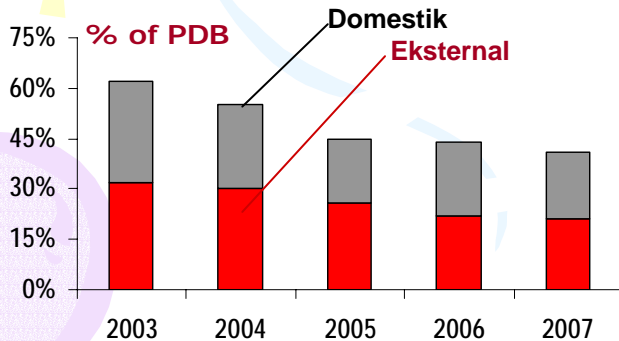


Source : MoF 2007

*) based on RAPBN-P 2007

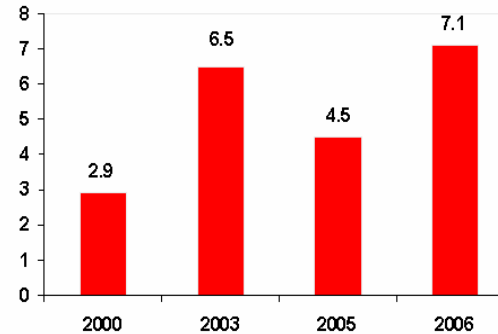
** based on RAPBN 2008

Public Debt Ratio



Public Investment

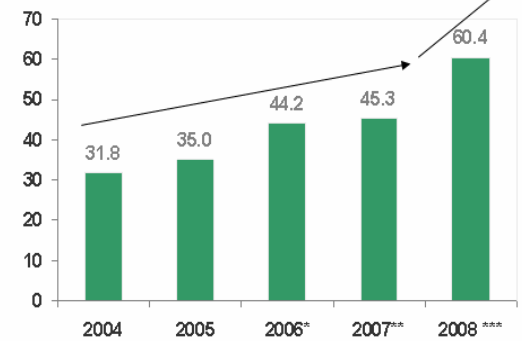
% of GDP



Source: BPS, MoF, World Bank staff estimates

Infrastructure Expenditures

Rp Trillions (in 2000 constant prices)



Note : *2006 Revised Budget (APBN-P); **2007 draft budget presented to parliament (RAPBN) and estimations of sub-national allocations *** 2008 RAPBN
Source : World Bank staff computations based on MoF and SIKD data.

KEBUTUHAN INVESTASI PADA INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Kebutuhan Investasi Infrastruktur Per Tahun 2005-2010

7 – 8 %
dari
PDB

4 – 5 %
dari
PDB

3 %
dari PDB

Selisih
Pendanaan per
Tahun (US\$
17.8 Milyar dan
akan diisi oleh
Pihak Swasta)

Alokasi Anggaran
Pemerintah Pusat
dan Daerah (US\$
4.2 billion)



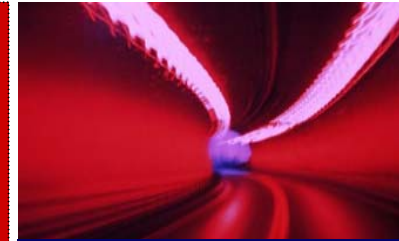
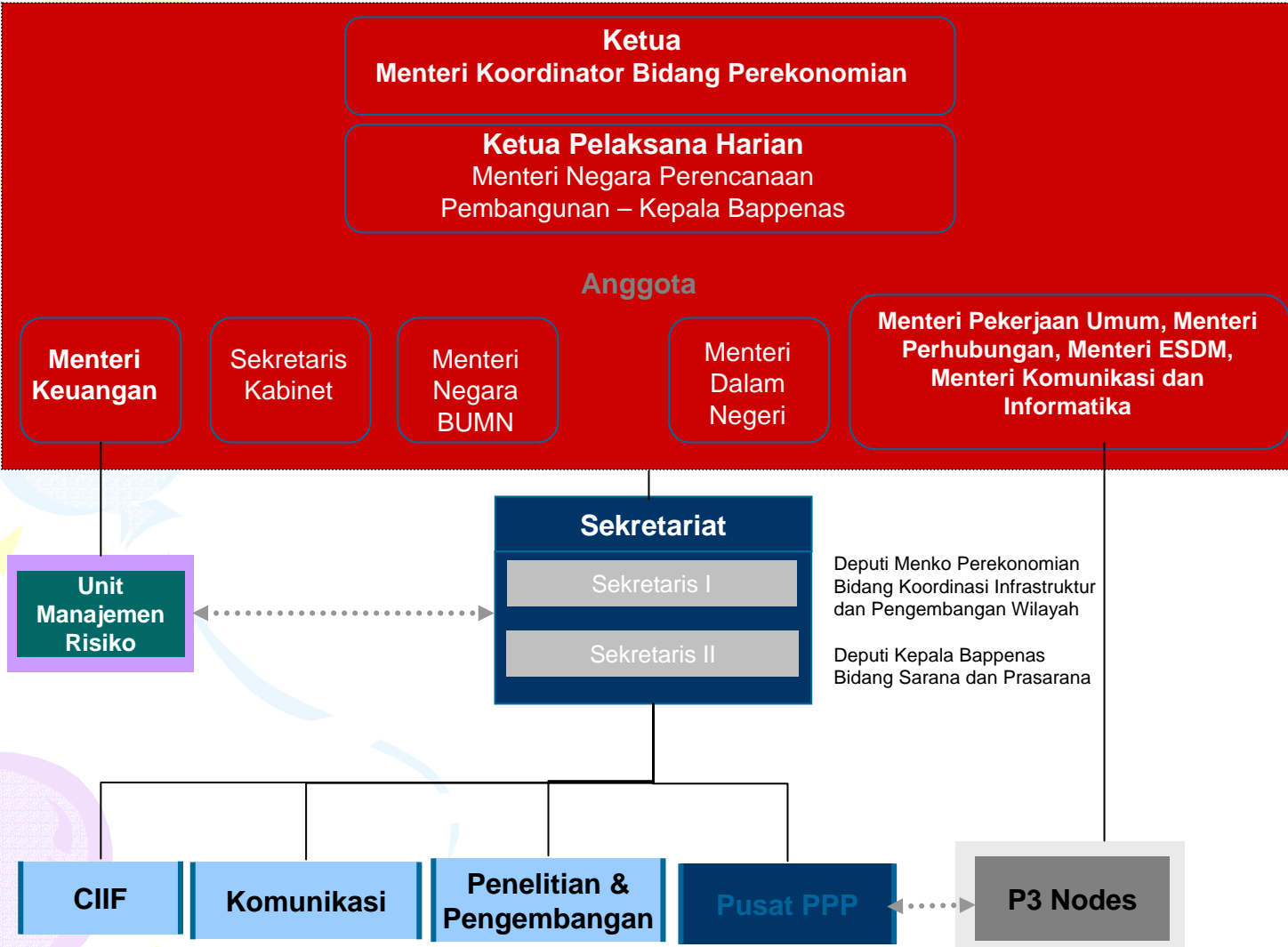
Kemampuan
Pemerintah memiliki
keterbatasan anggaran

Kondisi Ekonomi saat
ini menunjukkan bahwa
partisipasi pihak
swasta dibutuhkan

Rata – rata kebutuhan
Investasi per tahun
(US\$ 22 billion)

KKPPI - Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden No. 42/2005



Tugas

1. Merumuskan strategi koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur.
2. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah.
3. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum dalam percepatan penyediaan infrastruktur.
4. Menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur.

The background features a white surface with decorative elements on the left side. There are three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string and is surrounded by several yellow triangular streamers. A large red rectangular box is centered on the page, containing the title text in white.

PERMASALAHAN TELEMATIKA KITA

TELEMATIKA DI SEKITAR KITA

1. **“Prime Mover”** berbagai perubahan di dunia, terutama globalisasi ekonomi;
2. Menjadi alat utama dalam proses otomatisasi, on-line system, e-commerce, good governance and good corporate practices, dan e-democracy;
3. Menjadi alat pendorong perbaikan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat seperti e-learning/education, e-health, one-stop-services, dan berbagai aplikasi lain;
4. Sumber inovasi berbagai *breakthrough* di dunia.

TELEMATIKA DI INDONESIA

1. Cukup banyak kemajuan di tengah masyarakat;
2. E-literacy instansi Pemerintah sudah meningkat;
3. Digital Divide dan Income Divide;
4. Belum maksimal untuk *good governance practices* dan *e-democracy*;
5. Sudah ada Detiknas pengganti TKTI.

TANTANGAN

- 1. Kepedulian (*awareness*) yang masih rendah, terkadang justru membodohi. (Call center Garuda, SMS undian) ;**
- 2. Dirasakan masih menguntungkan pemerintah dan operator, bukan masyarakat.**
- 3. Belum secara langsung / massal menunjang ekonomi dan daya saing (menuju Knowledge Based Economy);**
- 4. Blunder dalam pengadaan fasilitas di desa.**

KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL

1. Sering kalah prioritas dengan infrastruktur lain (*blessing in disguise?*);
2. Kebijakan yang “dinamis” (TKTI-1045);
3. Masih tergabung dalam berbagai besaran ekonomi dan statistik lain, sehingga sulit mengukur kinerjanya (Tabel I/O);
4. Mendapat porsi yang masih terbatas dalam berbagai dokumen pembangunan nasional;
5. Belum mendapat dukungan maksimal industri / sektor terkait secara nasional.

TKTI 1045 : *REVISITED*

(10 years - 4 Keppres - 5 institutions)

- 1. Keppres 30/1997 (Menko Produksi dan Distribusi)**
- 2. Menkoekuwasbang**
- 3. Kabinet Pembangunan VII (Menko Ekuin/Ka Bappenas)**
- 4. National Reform / Orba stumbled – 1998 (Menpan)**
- 5. Keppres 50/2000 (Menkominfo)**
- 6. Keppres 9/2003 (Menkominfo)**
- 7. Keppres 20/2006 (Depkominfo)**
- 8. Resuffle May 2007 – Depkominfo/New Minister**

Keppres: Presidential Decree.

REGULASI

- 1. Masih tertinggal dibanding teknologi dan aspek komersil (masalah klasik).**
- 2. Masalah konvergensi UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, dan RUU ITE. Menuju road map yang baru;**
- 3. BRTI yang masih “menginduk” ke Ditjen Postel; belum independen (sampai kapan?);**
- 4. Apakah pemerintah sebaiknya terus mengatur atau hands-off? Mulai kapan?**

INDUSTRI TELEMATIKA

- 1. Blue Print (Telekomunikasi) sudah sangat membutuhkan pembaharuan;**
- 2. Blue print mana yang mau dipakai? Tersedia berbagai versi;**
- 3. Dirasakan masih minim perannya dalam industri nasional, meski potensi besar;**
- 4. Perlu penajaman prioritas sub-sektor atau komponen guna peningkatan daya saing;**
- 5. Khusus telekomunikasi, sangat rentan terhadap rent-seeking, terutama “penggorengan saham”.**

APLIKASI TELEMATIKA

- 1. Sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi juga banyak kendala;**
- 2. Perlu terus dicari terobosan kebijakan agar penyedia jasa *content* domestik terpacu membuat aplikasi produktif selain game;**
- 3. Techno-park seperti “kerakap tumbuh dibatu”, perlu kepastian dukungan nasional, pemda, lembaga penelitian, dan universitas;**
- 4. Apresiasi atas prestasi dan perlombaan di bidang telematika perlu ditingkatkan.**

SDM TELEMATIKA

- 1. Cukup banyak SDM bermutu namun belum dapat tempat yang “layak”, terjadi brain drain;**
- 2. Perlu melanjutkan penyebaran kurikulum telematika di berbagai tingkatan sekolah nasional (sudah dimulai sejak 2001);**
- 3. Kerjasama dengan ICT profesional harus tetap diprioritaskan, karena terbatasnya SDM telematika di birokrasi;**
- 4. Perlu penyusunan kebijakan pembinaan SDM telematika;**
- 5. Beberapa universitas besar telah memulai *e-campus*, seperti UPH dan Binus.**

DETIKNAS

- 1. Program yang dijalankan masih sesuai dengan penugasan;**
- 2. Belum didukung proses pendanaan yang memadai;**
- 3. Perlu langkah-langkah percepatan dan integrasi guna menghindari kegagalan seperti TKTI dulu;**
- 4. Kemajuan per kegiatan;**

RINGKASAN KEMAJUAN 7 FLAGSHIP DETIKNAS

Programs		Status
	e-Pendidikan	
	Nomor Identitas Nasional	
	e-Anggaran	
	e-Procurement	
	National Single Window	
	Palapa Ring	
	Software Legal	



Sesuai dengan jadwal



Masih dalam toleransi



Memerlukan perhatian khusus

7 FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS

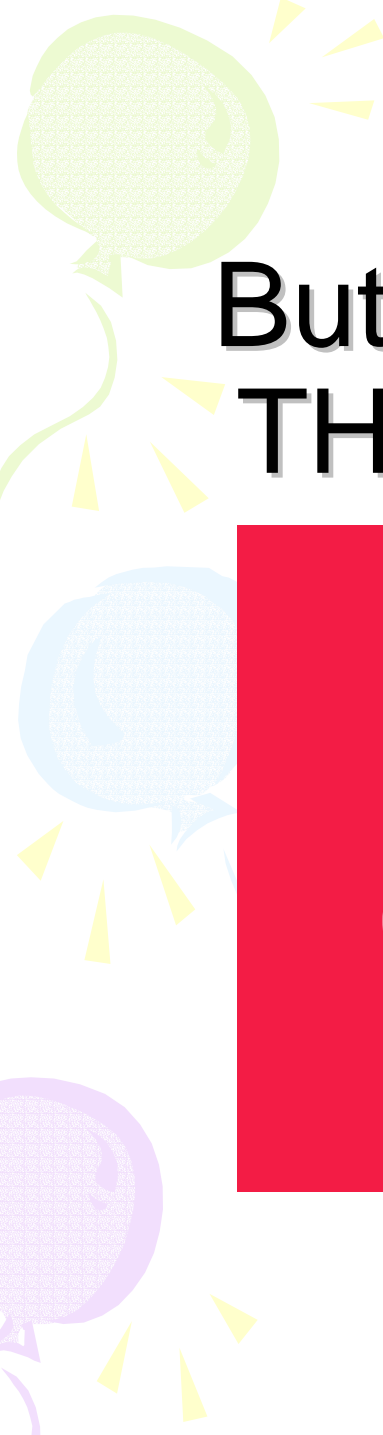
No.	Program Detiknas	Instansi Pelaksana	Sasaran	Status Terakhir	Keterangan
1	e-Pendidikan	Depdiknas	Meningkatkan kualitas SDM menyambut <i>Knowledge Based Society</i> .	Pelaksanaan (sesuai jadwal)	•Perlu percepatan.
2	National Single Window (NSW)	Depkeu	Membuka peluang ekspor dan impor yang lebih besar serta mempercepat pergerakan perekonomian, sehingga memiliki implikasi positif di forum Internasional.	Pelaksanaan (sesuai jadwal)	•Masih belum didukung regulasi. •RUU ITE sudah di DPR, tetapi belum mendapat prioritas. •Peresemian tahap I dan peluncuran portal NSW sudah dilakukan 17 Desember 2007.
3	e-Anggaran	Depkeu	Menciptakan Sistem Anggaran Nasional antar Kementerian / Lembaga dan DPR yang lebih transparan dan efisien.	Masih persiapan (terlambat)	•Perlu akselerasi di Depkeu dan Ditjen Anggaran.
4	Nomor Identitas Nasional (NIN)	Depdagri	Terciptanya penggunaan identitas tunggal untuk setiap penduduk sebagai dasar untuk berbagai keperluan pelayanan publik.	Persiapan (terlambat)	•Depdagri masih fokus untuk implementasi SIAK dalam rangka pemilu 2009. •Memerlukan penanganan khusus.
5	Legalisasi Software	Depkominfo & Deperindag	Meningkatkan citra positif Indonesia di forum Internasional dengan penggunaan software legal.	Pelaksanaan (sesuai jadwal)	•Perlu koordinasi dan sinkronisasi pendanaan di tiap departemen.
6	e-Procurement	Bappenas	Menciptakan proses tender / pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lebih transparan, aksesibel dan efisien.	Pelaksanaan (sesuai jadwal)	•Sosialisasi pusat dan daerah. •Sistem masih dalam taraf penyempurnaan.
7	Palapa Ring	Depkominfo	Menyediakan akses komunikasi dan Internet di seluruh kota / kabupaten, agar dapat dinikmati di seluruh Indonesia dengan harga murah.	Pelaksanaan (sesuai jadwal)	•Penandatanganan Perjanjian dengan Konsorsium pada tanggal <u>10 November 2007</u> . •Perlu sinkronisasi dan koordinasi usulan keringanan pembayaran pajak dan bea masuk dari konsorsium.

LAIN-LAIN

- 1. Open Source**
- 2. Satelite**
- 3. Aplikasi (E-Anggaran)**
- 4. UKMK**
- 5. ICT dan Ketersediaan listrik**
- 6. USO**
- 7. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual**
- 8. Sinkronisasi dan Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan**
- 9. Lain-lain**

The background features a white surface with decorative elements on the left side. There are three balloons: a green one at the top, a blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string of yellow streamers trailing downwards. The word "PENUTUP" is centered in a red rectangular box.

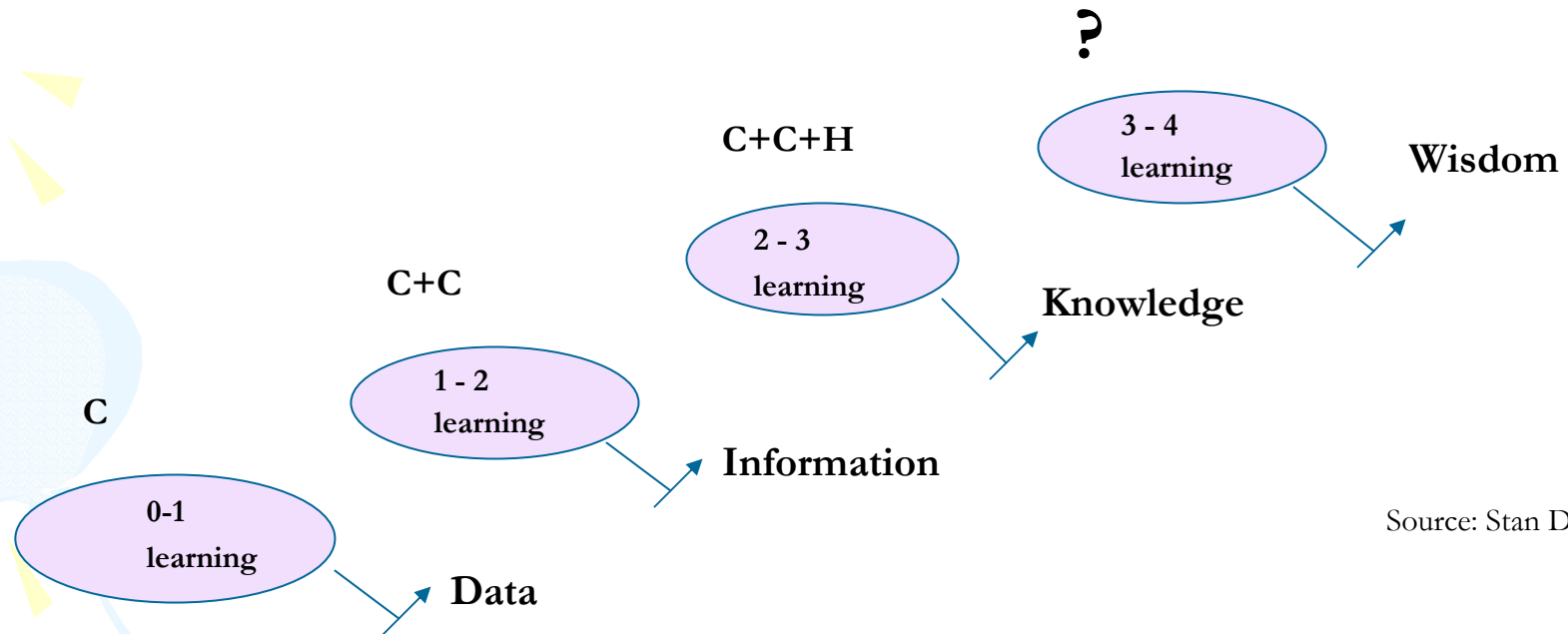
PENUTUP



But Please do not forget that
THE HIDDEN ISSUES IS...

**SORRY...,
CENSORED!!**

Four Steps to Wisdom



Source: Stan Davis (2001)

Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

T.S. Eliot, Choruses from "The Rock," I

(Collected Poems 1909-1919)



**THANK YOU &
GOOD LUCK IN YOU CAREER**



Eddy Satriya

- 1989 :Graduated from Bandung Institute of Technology (Telecommunication Engineering)
- 1997 :Graduated from University of Connecticut (MA in Economics)
- 1989-90: Program Management Consultancy (PMC-IV) for Telecommunication Development
- 1990-2005: Working in Bappenas (The National Development Planning Agency).
- 1995 : Sekretaris Dekom PT.Telkomsel
- **2005 (Dec)-present: Working in Coordinating Ministry for Economics Affairs**
- 1997- present: Visiting Lecturer in University of Indonesia, University of Pelita Harapan, and ITB
- 2002-present : Actively writes various article and column in national papers and magazines.

Recent publications are available on

eddysatriya.blogspot.com

kolom.pacific.net.id

Contact:

satriyaeddy@gmail.com

esatriya@ekon.go.id

021.3456714

Today's Frontpage



www.geocomputing.net

Feedback - Ads by Google

"Open Sourcing" oil and gas sector

Eddy Satriya, Jakarta

It is no big surprise that Indonesia's Upstream Oil and Gas Regulatory Body (BP Migas) is now struggling to select the best consultant to "fix" its financial report. Nor did we wonder when the Downstream Oil and

Opinion

New prophet, who cares?

Misconceptions about carbon emissions

Editorial



Iptek

Senin, 26 Maret 2007

- Rubrik
- Berita Utama
- Bisnis & Keuangan
- Humaniora
- International
- Iptek
- Metropolitan
- Nusantara
- Olahraga
- Opini
- Politik & Hukum
- Sosok
- Sumatera Bagian

Tukul, DPR, dan "Laptop Mania"

Akhirnya, salah satu aplikasi telematika, yaitu rencana pengadaan dan pemanfaatan laptop untuk anggota DPR, berhasil juga menjadi topik diskusi di berbagai lapisan masyarakat. Sayangnya diskusi yang bergulir bernada miring dan sinis. Tidak kurang dari pengamat politik Arbi Sanit dan rekan saya pengamat telematika Roy Suryo menyiratkan bahwa belum saatnya (semua) anggota DPR memiliki laptop (Kompas, 24/3).



Teknologi Informasi

Senin, 13 November 2006



- Rubrik
- Berita Utama
- Bisnis & Keuangan
- Humaniora
- International
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Metropolitan
- Nusantara
- Olahraga
- Opini
- Politik & Hukum
- Sosok
- Sumatera Bagian Selatan

Dewan Teknologi

Harap Cemas Menanti Kemajuan Teknologi Informasi

Seperti telah dilansir beberapa media, jika tidak ada aral melintang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan pencaanangan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau DTIKN di Istana Bogor pada Senin 13 November 2006. DTIKN merupakan kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong percepatan pengembangan Information and Communication Technology (ICT) di Indonesia.



Lindungi mata Anda dari polusi udara



Teknologi Informasi

Senin, 14 Maret 2005

- Rubrik
- Politik & Hukum
- Berita Utama
- Olahraga
- Metropolitan
- Naper
- Nusantara
- Bisnis & Investasi
- International
- Finansial
- Opini
- Geliat NAD & SUMUT

Agenda Besar Menanti Depkominfo

PENANTIAN panjang agar infrastruktur telekomunikasi dan urusan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dikelola di bawah satu atap berakhir sudah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, terhitung sejak 31 Januari 2005 Ditjen Pos dan Telekomunikasi telah digabungkan ke dalam Departemen Komunikasi dan Informatika atau Depkominfo.